

AKTUALISASI DIRI KORP PELAJAR PUTRI JAWA TIMUR DI RANAH BUDAYA PATRIARKI

Diana Ririn Nadhiroh

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

dianaririn.nadhiroh@gmail.com

Refti Handini Lisytani

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

dinibening@yahoo.co.id

Abstrak

Korp Pelajar Putri (KPP) sebagai lembaga semi otonom IPPNU memiliki tugas mengawal setiap kebijakan IPPNU dan kegiatan pengkaderan yang ada di kota/kabupaten. Akan tetapi KPP seringkali mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak salah satunya dari pengurus yang ada di kota/kabupaten dalam kinerjanya. Hal ini karena lembaga tersebut tidak pernah memperlihatkan eksistensi mereka dan hanya bisa bekerja sama dengan Lembaga *Corp Brigade* Pembangunan yang merupakan partner mereka. Oleh karena itu sebagai upaya untuk membuktikan ketidakbenaran atas tanggapan negatif tersebut, KPP Jawa Timur menunjukkan kemampuan mereka yang selama ini dianggap remeh dengan menunjukkan potensi mereka melalui *Greencamp*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami aktualisasi diri KPP Jawa Timur di ranah budaya patriarki melalui kegiatan *Greencamp*. Penelitian ini menggunakan konsep aktualisasi diri dalam perspektif Sosiologi Weber yakni status dan peran. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang lebih mementingkan penghayatan dalam menangkap suatu gejala. Adapun pendekatan yang digunakan yakni interaksionisme simbolik untuk memahami perilaku dan interaksi yang ditampilkan lewat simbol dan makna. Hasil dari penelitian ini adalah KPP memiliki status yang harus dipertahankan sehingga meski memiliki kewenangan khusus, tapi keberadaan mereka bisa terancam apabila tidak menjalankan fungsinya. Untuk itu, upaya aktualisasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mempertahankan statusnya dengan melakukan suatu peran. Melalui *greencamp*, KPP berhasil mendapatkan *prestise* serta *privilege* dari pihak-pihak yang dulunya meremehkan kemampuan mereka. Adapun interaksionisme simbolik salah satunya ditandai bahasa seperti penggunaan kode kepolisian “86” dalam kehidupan sehari-hari yang artinya siap, serta istilah “balik kanan” yang artinya pulang.

Kata Kunci : Aktualisasi, Patriarki, Organisasi.

Abstract

Korp Pelajar Putri (KPP) as a semi-otonom institution of IPPNU have the task of guarding all policies of IPPNU as well as oversee the activities of cadres in the city. However, KPP often received negative responses from various parties, one of the officials who were under them in performance. This is because these institutions never showed the existence of their own and can only work together with Corp Brigade Pembangunan institution which is their partner. Therefore an attempt to prove the truth on such negative response, KPP East Java want to show their abilities who had been underestimated by demonstrating their potential through Greencamp. The purpose of this research is to understand self-actualization of KPP in patriarchal culture through Greencamp. This study uses the concept of self-actualization in Weber Sociological perspective of the status and role. The research method used is a qualitative approach more comprehensive in capturing a symptom. As for the approach used the symbolic interactionism to understand the behavior and interaction was shown by symbols and meanings. The result of this study are KPP East Java has a status that must be maintained so although they have a special authority, but their existence is threatened if does not perform its function. Therefore, the effort undertaken actualization has a goal to maintain the status and role. Through Greencamp activity, KPP East Java managed to get prestige and privilege of parties that used to underestimate their abilities. As for the symbolic interactionism is marked languages such as the use of police code “86” in the daily life which means ready and the term “right” which means to return

Key Words : Actualization, Patriarchy, Organization.

PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk merealisasikan kapasitas dan potensi dirinya seoptimal mungkin dalam bentuk yang berbeda dengan orang lain sehingga menunjukkan jati diri orang tersebut. Kecenderungan tersebut menurut Abraham Maslow disebut sebagai aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui organisasi merupakan salah satu pilihan perempuan jaman sekarang. Organisasi merupakan kesatuan sistemik berbagai bagian dan menjamin setiap bagian dalam proses organisasi memperoleh porsi yang sesuai dengan kapasitas dan posisinya (Esha, 2006: 30). Organisasi sebagai wadah yang positif untuk aktualisasi individu berperan sebagai wadah pengembangan diri dalam rangka mengembangkan *softskill* dan karakter kepemimpinan (Ivancevich, 2006). Selain membutuhkan kebutuhan biologis, manusia juga memiliki kebutuhan aktualisasi dirinya. Manusia yang mengaktualisasikan dirinya, dapat memiliki banyak pengalaman berharga dibanding manusia yang kurang mengaktualisasikan diri. Mereka akan memiliki kemampuan menerima diri sendiri dan orang lain juga memiliki rasa segan dan rasa hormat terhadap orang lain. Salah satu contoh organisasi yang dapat dijadikan wadah mengaktualisasikan diri adalah organisasi pelajar dalam badan otonom Nahdlatul Ulama.

Didalam organisasi pelajar badan otonom Nahdlatul Ulama, terdapat satu lembaga yang memiliki kekhususan dibanding lembaga lain yang disebut Corp Brigade Pembangunan (CBP) dan Korp Pelajar Putri (KPP). CBP dan KPP merupakan lembaga semi otonom yang berada dibawah naungan organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yakni IPNU-IPPNU. Adapun yang dimaksud dengan lembaga semi otonom adalah lembaga yang berada dibawah naungan organisasi induk yang bisa membuat kewenangan dan kebijakan sendiri namun masih dibawah pengawasan organisasi induk tersebut. Ini berarti lembaga tersebut bisa membuat kebijakan dan kewenangan sendiri namun dengan catatan harus dengan sepengetahuan organisasi induk. Berbeda dengan lembaga biasa lain yang berada dibawah naungan organisasi induk yang tidak memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri (non otonom).

Lembaga KPP bergerak dibidangkependuan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, pengabdian alam

dan lingkungan hidup. Meski ruang lingkup dan bidang garapnya sama, namun lembaga CBP dan KPP tidak berada dalam satu garis komando melainkan berjalan sendiri-sendiri atau yang disebut dengan "satuan terpisah". Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta struktur kepengurusan antara CBP dan KPP juga tidak sama. CBP berada dibawah naungan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) sedangkan KPP berada dibawah organisasi naungan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). CBP hanya beranggotakan laki-laki dan KPP beranggotakan perempuan saja. Namun apabila dirasa belum mampu berjalan secara terpisah, maka kegiatan seringkali dilaksanakan bersama-sama.

Meski memiliki peraturan dan struktur yang berbeda, kedua lembaga ini pada dasarnya sama. Perbedaan diantara CBP dan KPP hanya pada jenis kelamin anggotanya. Akan tetapi pada pelaksanaannya, tiap kegiatan justru didominasi oleh CBP. Bahkan dalam beberapa kegiatan, KPP cenderung mengikuti kegiatan CBP dan diberi tugas yang lebih mudah dari CBP ketika di lapangan. Terdapat perbedaan peran yang menonjol antara CBP dan KPP ketika bertugas di lapangan. Perbedaan pembagian tugas ini didasarkan pada pandangan bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan tugas berat dan tidak sekuat laki-laki sehingga perempuan cenderung diberi tugas yang mudah dan kuantitas yang tidak banyak. Ini menunjukkan bahwa masih ada budaya patriarki yang cukup menonjol dalam lembaga ini.

Salah satu contohnya adalah ketika mengawal kegiatan Rapat Kerja Wilayah dan Konferensi Wilayah (Rakerwil dan Konferwil) IPNU-IPPNU Jawa Timur, CBP lebih banyak berperan aktif dalam membantu kegiatan seperti pengamanan di area bahkan sangat tanggap sebagai tim medis, sedangkan KPP mendapat tugas di bagian konsumsi. Bentuk lain dari perbedaan eksistensi CBP dengan KPP adalah sejarah tertulis CBP dan KPP. Diberbagai sumber yang ditelusuri baik online, website resmi maupun artikel, sejarah tertulis tentang perjalanan CBP lebih lengkap bahkan sangat mendetail dibanding KPP. Sejarah tertulis tentang KPP hampir tidak dapat ditemukan diberbagai sumber media. Meski ada, sejarah yang diceritakan tidak lengkap dan hanya membahas tentang fungsi KPP secara umum.

Selama beberapa periode terakhir, KPP Jawa Timur memang tidak nampak eksistensinya. Kemampuan mereka masih kurang dibanding CBP baik keaktifan, kreativitas dan sebagainya. Mereka dipandang oleh pengurus cabang di beberapa kota atau kabupaten hanya bisa mengikuti atau membantu dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan CBP maupun IPNU-IPPNU. Tidak hanya itu, dalam kegiatan bersama IPNU dan IPPNU, KPP cenderung kalah eksistensinya dibanding CBP. KPP masih kebingungan mengenai tugas dan apa yang harus mereka lakukan, sedangkan CBP terlihat lebih profesional dan selalu bisa menempatkan diri dengan baik, bertindak cepat serta mengerti apa yang harus dilakukan. Akibatnya banyak diantara pengurus laki-laki (CBP dan IPNU) tingkat cabang yang meremehkan kemampuan KPP Jawa Timur. Hal ini karena KPP Jawa Timur terlihat tidak memiliki program dan tidak menjalankan kegiatan apapun.

Namun akhir-akhir ini, DKW KPP mulai menunjukkan eksistensi mereka dalam menjalankan kegiatan. Hal ini terbukti dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DKW KPP IPPNU Jawa Timur pada 15-17 Januari 2016 yakni *Greencamp*. KPP bekerjasama dengan lembaga induk yakni IPPNU, begitu pula dalam jajaran kepanitiaan secara keseluruhan diisi oleh KPP dan IPPNU. KPP berusaha untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam kegiatan tersebut. Namun dalam aplikasinya, KPP tetap meminta bantuan kepada CBP untuk membantu teknis lapangan, atau dalam artian dijadikan sebagai 'pelengkap' dalam kegiatan tersebut. Hal ini karena KPP merasa terdapat beberapa hal yang tidak bisa dilakukan perempuan dan harus ada tenaga laki-laki.

Kegiatan *Greencamp* yang diselenggarakan oleh DKW KPP IPPNU ini dinilai baik mulai dari konsep kegiatan hingga kompetisi yang diselenggarakan. Dilihat dari jenis kegiatannya, kegiatan yang diselenggarakan DKW KPP Jawa Timur membutuhkan tenaga dan biaya ekstra untuk bisa ikut berpartisipasi. Kegiatan tersebut bukan kegiatan sederhana yang bisa dilakukan dengan santai. Hal ini seolah memperlihatkan bahwa KPP Jawa Timur tidak main-main dalam membuat kegiatan besar. DKW KPP Jawa Timur berusaha memperlihatkan kemampuan mereka yang tidak lebih lemah dari laki-laki. Mereka justru memperlihatkan eksistensi mereka dengan membuat kegiatan yang lebih baik.

Menurut Maslow, ada lima jenjang hirarki kebutuhan yakni fisiologis, rasa aman, rasa cinta, harga diri, dan aktualisasi (Siagian, 1989: 152). Namun dalam perspektif sosiologi, aktualisasi diri dijelaskan dengan konsep status dan peran dalam lapisan masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lain. Apabila suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, maka mereka yang mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak lain (Weber, 2012: 231). Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal.

Pengaturan orang-orang secara hirarkis dalam suatu sistem stratifikasi sosial merupakan satu segi yang sangat mendasar dalam pandangan Weber mengenai struktur sosial. Weber sependapat dengan Marx mengenai pokok pikiran ini, dan memperluas tekanan Marx pada dasar ekonomi untuk kelas sosial, dengan mengembangkan suatu gambaran yang lebih komprehensif mengenai paling kurang tiga dasar pokok stratifikasi yang berbeda secara analitis (Wirawan, 2012: 98). Orang juga digolongkan dalam lapisan-lapisan berdasarkan kehormatan atau *prestise*, seperti yang dinyatakan dalam gaya hidup bersama (Johnson, 1986: 224). Kelompok-kelompok status berlandaskan pada ikatan subyektif antara para anggotanya yang terikat menjadi satu karena gaya hidup yang sama, nilai serta kebiasaan yang sama, serta oleh perasaan akan jarak sosial dari kelompok-kelompok status lainnya.

Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Weber mendefinisikan 'kelas' adalah kelompok-kelompok yang peluang hidupnya ditentukan oleh situasi pasar, dibedakan dari 'status' atau 'kelompok status' yang nasibnya ditentukan oleh kehormatan yang disandingkan orang dengannya (Burke, 2003: 90). Adapun peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Peran menentukan

suatu “gaya hidup” dalam kehormatan status menunjukkan bahwa kelompok-kelompok status adalah pembawa spesifik segala “konvensi” (Narwoko, 2004: 139).

Didalam kehidupan sosial, ada lapisan yang sengaja disusun dalam suatu organisasi formal oleh mereka yang berwenang untuk itu. Faktor-faktor yang terdapat didalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan didalam masyarakat luas dimana organisasi itu berada. Semua pergerakan dalam organisasi harus mengikuti dan melalui susunan kedudukan-kedudukan yang sudah ditentukan dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat lebih dahulu, maka organisasi itu kehilangan keluwesan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada keadaan-keadaan masyarakat umum yang senantiasa berubah. Juga karena penggunaan personal didalam organisasi tersebut terikat pada sistem pembagian kedudukan yang telah ditentukan. Maka tidak dapat digunakan sebaik-baiknya kemampuan mengambil inisiatif dan kemampuan memimpin yang ada pada mereka yang karena kedudukannya tidak mempunyai wewenang untuk mengambil inisiatif atau menjalankan pimpinan. Akibatnya perbedaan antara kedudukan dengan kecakapan pribadi menjadi kabur. Sistem yang kaku dan terikat pada peraturan-peraturan yang ketat menyebabkan timbulnya suatu *elite* yang mempunyai kepentingan-kepentingan besar tidak adanya keseimbangan keadilan dan sebagainya (Soekanto, 2005: 248).

METODE

Secara metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, realitas sosial adalah wujud bentukan (konstruksi) para subyek yang terlibat dalam penelitian (Moleong, 2014: 6). Oleh karena realitas sosial adalah buah intersubektivitas, maka dalam penelitian kualitatif hubungan antara peneliti dan subyek pada dasarnya menunjuk pada proses interaksi sosial.

Tipe pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif interaksionisme simbolik. Proporsi paling mendasar dari interaksionisme simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibedakan, karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Prinsip metodologi interaksi simbolik ini sebagai berikut: 1) Simbol dan interaksi itu menyatu. Tak

cukup bila hanya merekam fakta, melainkan juga harus mencari konteks sehingga dapat ditangkap simbol dan makna sebenarnya. 2) Jati diri subyek perlu ditangkap. 3) Peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dan jati diri dengan lingkungan yang menjadi hubungan sosialnya. 4) Direkam situasi yang menggambarkan simbol dan maknanya, bukan hanya merekam fakta sensual. 5) Metode yang digunakan mampu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya. 6) Metode yang dipakai mampu menangkap makna dibalik interaksi. 7) *Sensitizing* yaitu sekedar mengarahkan pemikiran yang cocok dengan interaksionisme simbolik, dan ketika memasuki lapangan perlu dirumuskan menjadi yang lebih operasional, menjadi *scientific concepts* (Wirawan, 2012: 115).

Penelitian dengan judul “Aktualisasi Diri Korp Pelajar Putri Jawa Timur di Ranah Budaya Patriarki” ini dilakukan di kantor PWNu Jawa Timur yang berada di Jl. Masjid Akbar Timur No. 9 Surabaya. Subyek dalam penelitian ini terdiri atas pengurus KPP Jawa Timur yang dipilih menggunakan metode *purposive* dengan kriteria subyek bukan pengurus *reshuffle*, aktif DKW KPP Jawa Timur, dan menjadi panitia serta bertanggung jawab dalam kegiatan *Greencamp* sehingga dengan demikian maka akan mudah diketahui proses sosial yang terjadi dan mengetahui bagaimana upaya aktualisasi diri yang dilakukan oleh pengurus KPP Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi tak terstruktur sehingga tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sehingga bisa secara leluasa melacak berbagai segi dan arah guna mendapat informasi yang lengkap dan semendalam mungkin. Analisis data kualitatif tidak sekedar menjelaskan fenomena yang ada melainkan makna yang ada di dalam lapangan (Burhan, 2009: 157). Selain itu, observasi juga tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen yang baku melainkan hanya dengan rambu-rambu penelitian (Sugiyono, 2012: 140). Setelah hasil kegiatan sehari-hari diperoleh, perlu ditindaklanjuti untuk memahami makna yang tersembunyi dibalik fenomena yang dimaksud.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model Spradley. Analisis ini dimulai dengan analisis domain. Pada tahap ini fokus sudah ditentukan dan dilanjutkan melakukan analisis

taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya diajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial selanjutnya tema-tema budaya dapat ditemukan yang kemudian dituliskan dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elit Vs Anggota Korp Pelajar Putri

Korp Pelajar Putri Jawa Timur memiliki struktur kepengurusan dan garis koordinasi sendiri terlepas dari IPPNU. Struktur kepengurusan KPP terdiri atas Komandan, Sekretaris, koordinator tiap bidang yang disebut sebagai Wakil Komandan, serta anggota bidang. Dalam struktur tersebut, pengurus KPP dapat dibedakan menjadi dua yakni Elit KPP dan anggota KPP. Komandan serta sekretaris merupakan elit yang ada dalam kepengurusan KPP yang mampu mengendalikan struktur, sedangkan koordinator dan anggota bidang merupakan anggota yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan.

Tabel 1. Kategorisasi KPP

PENCIRI	ELIT	ANGGOTA
Latar belakang ke-NU-an	Bukan keluarga kyai	Bukan keluarga kyai
Latar belakang pendidikan agama	Pernah belajar di pondok pesantren	Pernah belajar di pondok pesantren
Kondisi sosial	Bekerja	Kuliah
Tingkat pengkaderan	Diklatnas dan Diklatmad	Diklatama

Elit KPP justru mengakui bahwasanya dalam beberapa hal KPP memang berada dibawah CBP. Sejarah menunjukkan bahwa selama ini KPP hampir bergantung pada CBP. Hal ini dilihat dari banyaknya kelengkapan KPP yang mengadopsi milik CBP seperti petunjuk pelaksanaan lembaga, logo hingga seragam. Elit KPP mengakui bahwa dalam banyak hal mereka memang kalah eksistensi dibanding CBP. Mereka menyadari bahwa pergerakan KPP memang sangat pelan sedangkan CBP diakui jauh lebih cepat dan tanggap. Contohnya adalah pelaksanaan Rakornas, KPP untuk pertama kalinya bisa melaksanakan Rakornas pada tahun 2012 sejak terbentuk tahun 1964. Berbeda dengan CBP yang telah menyelenggarakan Rakornas tiga kali yakni pada tahun 2007, 2010 dan 2014.

Anggota KPP menganggap bahwa dalam tubuh CBP dan KPP tidak ada yang namanya istilah patriarki. Mereka bekerja bersama dan melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan porsinya masing-masing. Tidak ada istilah yang satu lebih eksis daripada yang lain melainkan satu sama lain saling membantu dan melengkapi.

Tabel 2. Pandangan KPP terhadap Patriarki

PANDANGAN	ELIT	ANGGOTA
Eksistensi CBP	Mengakui bahwa CBP lebih mendominasi	Tidak mengakui bahwa CBP lebih baik melainkan mereka memiliki kemampuan yang sama
Eksistensi KPP	Menyadari sebagai perempuan KPP memiliki waktu dan tenaga yang terbatas	Menganggap KPP dan CBP memiliki porsi yang sama dan tidak ada yang lebih banyak dari yang lain
Patriarki	Menyadari adanya patriarki	Tidak mengakui adanya patriarki
Keterangan	Tunduk	Tidak tunduk

Aktualisasi Diri Korp Pelajar Putri Jawa Timur

Aktualisasi diri adalah adanya kecenderungan individu untuk mengembangkan bakat dan kapasitas sendiri. Adapun aktualisasi diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan anggota DKW KPP Jawa Timur untuk mengembangkan seluruh potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Aktualisasi diri menurut perspektif Weber, individu tidak harus menempuh tahapan berdasarkan hirarki tertentu untuk beraktualisasi. KPP menyelenggarakan kegiatan *greencamp* sebagai media aktualisasi diri tidak harus melewati empat tahapan terlebih dahulu.

KPP Jawa Timur sebagai lembaga semi otonom ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga maupun departemen lain yang non otonom. Meski mereka memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki lembaga lain, mereka tetap tidak memiliki hak yang sama dengan organisasi induk. Menurut Weber, status mereka sebagai lembaga semi otonom harus dipertahankan keberadaannya didalam struktur

organisasi. Bagaimanapun juga hak tertinggi berada pada ketua IPPNU sehingga apabila ketua menghendaki maka lembaga KPP bisa saja dihapuskan. Untuk itu mereka berusaha mempertahankan statusnya melalui terselenggaranya kegiatan *greencamp*. Selain itu, untuk mempertahankan status maka mereka harus melakukan perannya sebagai lembaga. Untuk itu lah KPP menyelenggarakan kegiatan *greencamp* karena memang peran mereka demikian.

Mereka mempertahankan status KPP di organisasi induk melalui peran mereka. Artinya *greencamp* yang merupakan sarana aktualisasi diri hanyalah alat untuk melanggengkan status mereka dan apa yang KPP lakukan dengan menyelenggarakan *greencamp* semata-mata untuk melaksanakan perannya. Kegiatan *greencamp* yang diselenggarakan KPP Jawa Timur bisa terlaksana karena memang itu adalah tugas mereka sebagai lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan kesehatan. Ini berarti kegiatan tersebut sebenarnya adalah peran mereka sebagai lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan juga memiliki tujuan untuk mendapat *prestise*. Peran yang mereka miliki tersebut muncul karena mereka memiliki status. KPP tidak mungkin bisa beraktualisasi diri apabila tidak memiliki status sebagai lembaga yang bergerak dibidang tertentu. Ketika KPP memiliki status dan peran, maka mereka bisa beraktualisasi diri.

Menurut Weber, usaha aktualisasi diri yang dilakukan oleh KPP memiliki tujuan agar mereka mendapat *privilege* dan *prestise*. Ketika mereka menyelenggarakan kegiatan yang besar, maka mereka secara tidak langsung akan menerima penghargaan berupa citra diri yang tinggi di masyarakat dan dimata pengurus IPNU-IPPNU se-Jawa Timur. Mereka memiliki salah satu motif tujuan untuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka sebenarnya mampu sehingga dengan adanya kegiatan *greencamp* mereka menunjukkan kemampuan mereka kepada pengurus-pengurus cabang yang selama ini meremehkan mereka. Artinya, secara tidak langsung mereka ingin mencari *prestise* dan *privilege*.

KPP Jawa Timur memang memiliki kedudukan yang cukup diperhitungkan. Namun apabila dengan kedudukan tersebut KPP tidak menjalankan perannya dengan baik, maka mereka akan kehilangan

kepercayaan dari struktur yang ada dibawah. Untuk itu lah mereka harus menjalankan peran mereka agar mampu mempertahankan kedudukan dan status mereka dalam organisasi. Peran yang dilakukan oleh KPP termasuk dalam peranan yang diharapkan (*expected roles*). KPP Jawa Timur dituntut untuk melaksanakan perannya untuk mengawal kegiatan yang ada dicabang-cabang. Lebih dari itu mereka juga dituntut untuk bereksistensi tidak hanya dengan membuat kegiatan bersama CBP tapi karena mereka benar-benar mampu dan harus bisa melaksanakan peran yang sesuai dengan posisinya. Sementara untuk posisi tersebut merupakan identifikasi status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Peranan yang dimainkan oleh KPP sebenarnya juga sarana aktualisasi diri.

Budaya Patriarki dalam CBP-KPP

Budaya patriarki memang sangat kuat didalam tubuh Nahdlatul Ulama. Antara laki-laki dan perempuan diberi sekat yang sangat tebal yang tidak dapat ditembus. Dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama hanya terdiri atas laki-laki yang terdiri atas kyai-kyai dan orang-orang yang sudah lama berkiprah dibadan otonom Nahdlatul Ulama. Perempuan tidak diberi ruang yang sama didalam tubuh NU melainkan diberi tempat yang khusus dalam badan otonom Nahdlatul Ulama seperti Muslimat, Fatayat dan IPPNU. Sekat-sekat ini seolah sengaja dibuat agar perempuan tidak bisa ikut campur dalam mengendalikan struktur, melainkan laki-laki lah satu-satunya yang berhak mengendalikan struktur. Dilihat dari sisi sejarah, organisasi Nahdlatul Ulama didirikan oleh para Kyai atas dasar perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum sunni. Terlihat bahwa dari awal terbentuknya, tidak ada campur tangan perempuan dalam tubuh NU. Hal inilah yang menyebabkan perempuan tidak dapat masuk dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Ideologi patriarki tidak dapat diruntuhkan karena bagaimanapun perempuan hampir selalu bergantung pada laki-laki. Meski kegiatan *greencamp* murni diisi kepanitiaan dari KPP dan IPPNU, hal tersebut tidak berarti bahwa mereka dapat melepaskan diri secara penuh dari CBP. Mereka tetap meminta bantuan CBP sebagai tim keamanan. Bahkan meski dalam undangan tertulis sebagai keamanan, mereka tetap

meminta *full service* dari CBP. KPP secara tidak langsung sebenarnya juga mendukung kekuasaan CBP. Tanpa kerjasama KPP, patriarki tidak akan berlangsung. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa KPP memiliki banyak kekurangan daripada CBP. Namun mereka justru bersyukur karena CBP mampu menerima hal tersebut dan menyadari kekurangan dari KPP. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh pengurus cabang. Di tingkat Jawa Timur, baik CBP dan KPP saling melengkapi dan memahami. Berbeda dengan di tingkat cabang dimana antara CBP dan KPP sering terjadi permasalahan. Banyak anggota CBP yang menganggap remeh kemampuan KPP yang menjadi partnernya, bahkan adapula KPP yang enggan bekerja sama dengan CBP karena sikap mereka yang arogan dan meremehkan kelemahan rekan KPP mereka sehingga CBP KPP Jawa Timur dianggap bisa dijadikan contoh oleh pengurus cabang.

Secara umum, laki-laki memegang kekuasaan di semua lembaga penting dalam masyarakat patriarki tetapi ini bukan berarti bahwa perempuan sepenuhnya tidak berdaya atau sepenuhnya tidak punya hak. Faktanya tidak ada sistem yang timpang yang bisa berlangsung tanpa partisipasi golongan yang ditindas yang sebagian darinya mendapat keuntungan. KPP mencapai kekuasaan dengan memegang kendali, tetapi hal ini tidak mengubah fakta bahwa sistem ini tetap didominasi oleh CBP. Dalam hal eksistensi, KPP Jawa Timur tidak merasa kalah eksis dengan CBP. Mereka saling membagi *jobdisk* yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Walaupun dalam beberapa hal KPP menyadari bahwa CBP lebih baik dan tanggap ketika di lapangan, namun KPP tidak merasa iri dan merasa bersyukur karena CBP mau memahami kekurangan mereka. Memang ada anggota KPP yang merasa iri dengan CBP seperti subyek keempat, namun iri yang dimaksud bukan ketika di lapangan, melainkan kodrat mereka sebagai laki-laki sehingga mereka bebas pergi kemana saja tanpa ada larangan dari orang tua.

KPP sebenarnya berada pada posisi dibawah (*bow*) CBP. Hal ini ditunjukkan dengan bukti historis dimana seragam dan logo KPP disadur dari CBP. Hal ini menunjukkan bahwa KPP kurang kreatif karena tidak berinisiatif membuat perbedaan logo dan seragam. Selain itu, logo KPP ternyata tidak memiliki makna khusus karena pembuatnya yakni Bu Dewi

Aisyah hanya asal menggambar dengan simbol-simbol filosofis yang sudah umum dalam NU. Yang membedakan hanya simbol keputrian yang ditunjukkan dengan kuncup melati. Berbeda dengan IPNU dan IPPNU yang dari segi logo, simbol yang digunakan dan makna filosofis yang ada didalamnya satu sama lain walaupun ada sedikit persamaan.

Upaya aktualisasi yang mereka lakukan ditujukan untuk membuktikan kemampuan yang mereka miliki kepada kader-kader yang ada dibawah yang selama ini meremehkan mereka. Untuk relasi dengan CBP Jawa Timur sendiri, mereka merasa nyaman karena CBP Jawa Timur memiliki pemikiran yang lebih dewasa daripada pengurus yang ada dibawahnya. CBP cabang cenderung meremehkan KPP yang menjadi rekannya bahkan meremehkan KPP Jawa Timur juga, namun ditingkat wilayah CBP dan KPP bekerja sama dan saling melengkapi tanpa adanya perasaan iri. Untuk itulah aktualisasi yang mereka lakukan ditujukan untuk memperoleh pengakuan atau *prestise* dari kader yang ada dibawahnya.

KPP seolah tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berada dibawah CBP sehingga menganggap posisi mereka sama dan saling pembantu, padahal sebenarnya secara tidak langsung KPP tengah didominasi oleh CBP. Misalnya pada kegiatan Jambore yang sebenarnya merupakan kegiatan CBP. Ada yang mengira bahwa sebenarnya kegiatan Jambore merupakan kegiatan bersama seperti pada subyek pertama, padahal sebenarnya Jambore merupakan kegiatan milik CBP seperti yang tertera dalam surat undangan yang dikirim ke cabang. Namun banyak pula diantara mereka yang mengetahui bahwa Jambore merupakan kegiatan CBP. Akan tetapi, mereka justru berterimakasih karena CBP menggandeng KPP dalam kegiatan tersebut.

Hal inilah yang memunculkan persepsi bahwa selama ini KPP hanya bisa *nunut mburi* pada CBP. Padahal pada kegiatan Jambore, tenaga KPP digunakan secara maksimal dengan cara memasukkan nama KPP dalam kepanitiaan inti walau hanya sebagai anggota. KPP juga ikut dalam kepanitiaan menyeluruh seperti keamanan, kesehatan, perlengkapan dan sebagainya. Artinya, pada kegiatan tersebut KPP berkontribusi tenaga dan waktu secara penuh, baik sebelum maupun pada hari pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan *greencamp*, tenaga CBP

hanya dimaksimalkan sebatas pembantu umum dibidang protokoler dan koordinator lapangan pada hari pelaksanaan. Artinya, CBP tidak ikut “bekerja keras” dan hanya membantu seperlunya, sehingga saat sebelum dan pada hari kegiatan, mereka justru banyak bersantai karena tugas mereka hanya membantu “seperlunya”. Artinya, KPP selama ini tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berada diposisi yang lebih rendah.

Interaksionisme Simbolik Korp Pelajar Putri Jawa Timur

Perilaku manusia sebagai sosial dan berbeda dengan perilaku hewan pada umumnya ditandai dengan stimulus dan respon. Perilaku merupakan produk dari penafsiran individu atas objek disekitarnya. Makna yang mereka berikan kepada objek berasal dari interaksi sosial dan dapat berubah selama interaksi itu berlangsung. Hal tersebut senada dengan apa yang bisa dilihat dalam organisasi Korp Pelajar Putri dimana pemaknaan yang terjadi dalam masyarakat terhadap KPP setelah terselenggaranya kegiatan *greencamp* berkonotasi positif. Penampilan dengan gaya berpakaian yang rapi, sopan serta aktivitas positif mereka dalam organisasi membentuk respon masyarakat terhadap mereka.

Sebelum menyelenggarakan kegiatan *greencamp*, kader-kader IPNU dan IPPNU yang ada di kota dan kabupaten di Jawa Timur menganggap bahwa KPP Jawa Timur tidak pernah menunjukkan eksistensi mereka ke bawah sehingga kemampuan mereka dipertanyakan. Bahkan ada pula kader dari CBP yang merendahkan dan meremehkan kemampuan KPP Jawa Timur. Namun setelah terselenggaranya kegiatan tersebut, konstruksi kader-kader yang ada dibawah berubah menjadi positif. Banyak pujian diluncurkan dari pengurus cabang kepada pengurus KPP Jawa Timur yang telah sukses membuat kegiatan.

Cara para anggota Korp Pelajar Putri menunjukkan identitas mereka sebagai seorang anggota KPP yakni dengan atribut yang melekat pada dirinya. Contohnya pada seragam KPP, ada atribut yang menunjukkan tingkatan tempat dimana ia berada. Apabila pengurus cabang, maka ada penulisan “DKC” ditambah kota atau kabupaten dimana ia berada. Sementara di tingkat Jawa Timur, maka dalam seragam tersebut bertuliskan “DKW” didada bagian kiri dan tulisan “Jawa Timur” dilengan

sebelah kanan. Mereka juga memiliki atribut yang berbeda apabila berada didalam kegiatan lapangan maupun didalam ruangan. Untuk forum formal yang berada diruangan, mereka mengenakan seragam yang mereka sebut PDH (Pakaian Dinas Harian) berupa kemeja warna putih tulang dengan rok warna hijau *army*, kerudung hijau muda dan bersepatu fantofel yang menunjukkan identitas terpelajar. Ketika berada didalam ruangan, mereka menunjukkan sisi feminim mereka. Namun ketika berada dilapangan, mereka menggunakan seragam PDL berupa kaos kombinasi warna biru dongker dan oren, kerudung oren, celana kempol, topi rimba dan sepatu *safety*. Ciri-ciri seperti memakai topi rimba, sepatu *safety* dan celana kempol ditujukan untuk lebih memunculkan sisi maskulinitas anggota KPP. Tidak hanya itu, untuk kegiatan pada malam hari dan agar terlihat keren mereka menggunakan jam tangan yang mampu menyala dalam kegelapan yang modelnya mirip jam tangan laki-laki.

Secara keseluruhan gaya dalam berperilaku KPP Jawa Timur seperti gaya berbicara dan bersikap mereka seperti laki-laki. Cara berbicara misalnya perempuan biasa menjaga cara berbicara dengan tetap menjaga sopan santun, maka mereka bisa berbicara dengan kasar tanpa memikirkan *imej* mereka dihadapan orang lain. Mereka bisa mengucapkan kata-kata kasar dan kurang pantas, atau saat mereka tertawa, maka mereka bisa tertawa lepas seperti laki-laki. Karena hal itu, mereka jadi lebih mudah ketika bergaul dengan laki-laki karena tindakan mereka yang menyerupai laki-laki. Begitu pula cara duduk mereka yang meniru laki-laki dimana satu kaki dilipat ke samping dan kaki satunya dilipat keatas.

Selain itu, mereka secara tidak langsung menerapkan sikap-sikap yang mereka pelajari dilembaga dalam keseharian mereka, baik ketika berinteraksi dengan sesama anggota CBP-KPP maupun dengan IPNU-IPPNU yang memahami tindakan mereka. Misalnya dalam berkomunikasi, mereka menggunakan kode kepolisian “86” yang berarti “siap”. Kode kepolisian biasanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan formal seperti kegiatan pengkaderan, rapat kerja, konferensi, maupun kegiatan-kegiatan lain yang memanfaatkan Walkie Talkie untuk berkomunikasi. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga menggunakan kode “86” ketika mereka menyanggupi permintaan rekannya.

Bagan 1. Interaksi Simbolik Korp Pelajar Putri Jawa Timur



Contoh lainnya adalah ungkapan “balik kanan” yang merupakan salah satu aba-aba dalam baris berbaris. Lembaga ini sering menggunakan ungkapan “balik kanan” dalam kehidupan sehari-hari yang berarti “pulang”. Misalnya dalam suatu kegiatan pengkaderan ketika instruktur panitia membacakan kontrak belajar maka ia menginstruksikan yang tidak sepakat dengan kontrak tersebut dipersilahkan “balik kanan” yang berarti pulang. Ketika sedang berkumpul dalam acara sederhana seperti rapat, apabila mereka hendak pulang duluan maka mereka akan menyampaikan “Aku ‘*tak* balik kanan dulu, ndan” untuk menyampaikan bahwa mereka hendak pulang duluan. Mereka secara tidak langsung menggunakan istilah militer dalam gaya hidup mereka.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya aktualisasi diri KPP Jawa Timur dilakukan karena KPP sebagai lembaga semi otonom ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki ‘kedudukan’ yang sama dengan lembaga maupun departemen lain. Meski mereka memiliki hak istimewa dibanding lembaga lain, mereka tetap tidak memiliki status yang sama dengan organisasi induk. Apabila ketua IPPNU berehndak, lembaga KPP bisa saja dihilangkan apabila mereka tidak melakukan fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, KPP memiliki status dan kedudukan yang harus dipertahankan. Usaha mempertahankan status yakni dengan melakukan suatu peran. Apabila KPP tidak berperan sebagaimana fungsinya, maka kedudukan KPP bisa saja dihilangkan atau dihapuskan karena tidak fungsional. Kegiatan *greencamp* yang diselenggarakan KPP Jawa Timur sebenarnya adalah peran mereka sebagai lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan kesehatan. Namun setelah *greencamp* terlaksana, KPP banyak mendapat pujian dari berbagai pihak terutama dari kader-kader yang dulunya meremehkan mereka. Peran yang mereka miliki tersebut muncul karena mereka memiliki status. Hal ini berarti KPP tidak mungkin bisa beraktualisasi diri apabila tidak memiliki status sebagai lembaga yang bergerak dibidang tertentu.

Adapun interaksi simbolik KPP ditandai dengan adanya simbol, bahasa dan tindakan. *Pertama*, simbol ditandai dengan atribut yang melekat seperti pakaian, bedge, sepatu, hingga topi. Pakaian Dinas Harian (PDH) merupakan simbol yang digunakan untuk kegiatan dalam ruangan. Mode pakaian kemeja dengan rok dan sepatu fantofel menunjukkan identitas mereka yang terpelajar. Adapun Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berupa kaos kombinasi warna biru dongker dan oren, topi rimba, celana kempol dan sepatu *safety* yang digunakan pada kegiatan diluar lapangan lebih menonjolkan maskulinitas. Kedua, yakni tindakan yang terlihat dari cara duduk mereka yang mengadopsi gaya duduk laki-laki seperti satu kaki melipat ke samping dan satu kaki melipat ke atas. Selain itu, mereka juga tertawa lepas seperti laki-laki dan tidak mempedulikan *imej* mereka. Justru dengan itu mereka mampu lebih mudah bergaul dan akrab dengan laki-laki. *Ketiga*, bahasa dimana mereka tidak merasa malu mengucapkan kata-kata

yang kurang sopan. Mereka dengan bebas berkata-kata bahkan ketika sedang bersama laki-laki.

Saran

Untuk lembaga KPP, hendaknya perlu disadari bahwa perlu ada perubahan cara pandang terhadap kesempatan aktualisasi diri dengan peningkatan kompetensi dibidang keilmuannya masing-masing. Maka kesempatan aktualisasi tidak hanya dicapai melalui jabatan struktural melainkan juga melalui usaha mempertunjukkan kompetensi keilmuannya. Selain itu perlunya ada kesediaan dari setiap institusi untuk mereformulasi organisasinya agar menjadi organisasi yang berwawasan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. 2007. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: YayasanObor Indonesia
- Esha, Muhammad In'am. 2006. *Kepemimpinan di Era Demokrasi Deliberatif*. El-Qudwah Ed. 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Malang: UIN Press
- Ivancevich, John M. dkk. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, ed. 7, jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan Robert . Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia
- Moleong, J. Lexi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (ed.). 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Siagian, Sondang P. 1989. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV
- Weber, Max. 2012. *Sosiologi*. Terjemahan Noorkholis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wirawan, Ida Bagus. 2012. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana